



Kota Yogyakarta				Kab Sleman				Kab Bantul				Kab Kulonprogo				Kab Gunungkidul			
Gol	WB	PRC	TC	Gol	WB	PRC	TC	Gol	WB	PRC	TC	Gol	WB	PRC	TC	Gol	WB	PRC	PLMNA
A	1	42	21	A	16	A	0	19	1	A	13	0	0	0	0	A	1	10	-
B	6	38	13	B	24	B	0	7	1	B	14	0	0	0	0	B	5	10	-
O	13	111	17	O	15	O	0	17	1	O	14	0	0	0	0	O	4	11	-
AB	0	30	6	AB	9	AB	0	3	1	AB	8	0	0	0	0	AB	1	0	-

Stok Darah
PMI
Tribun Jogja
Charity

Jadwal Sholat
Yogyakarta dan sekitarnya

Subuh	04:08 WIB
Dzuhur	11:48 WIB
Ashar	15:14 WIB
Maghrib	18:05 WIB
Isha	19:20 WIB

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY



JOGJA ASAT - Sebuah mural tentang kekeringan terpanjang di Jembatan Kewek, Kleringan, Kota Yogyakarta. Mural yang berisi kritik atas terjadinya kekeringan di wilayah Yogyakarta itu diduga akibat banyaknya pembangunan hotel-hotel yang menggunakan sumur tanah.

DOK. TRIBUN JOGJA

Komunitas "Warga Berdaya" Merespons Pembangunan

Lihatlah Realitas Yogyakarta dari Belakang Hotel

Pembangunan hotel di berbagai sudut Yogyakarta, bisa menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi provinsi yang terkenal dengan keistimewaannya ini. Pertumbuhan hotel baru yang cukup banyak, juga menandakan sektor pariwisata di Yogyakarta berkembang pesat.

NAMUN ada satu hal yang dilupakan oleh pemerintah dan investor, yaitu nasib warga yang terkena dampak pembangunan hotel-hotel. Salah satunya sumur warga yang mengering. Beberapa warga pun seringkali meneriakkan "Jogja asat!", sebagai ekspresi kekesalan kepada pihak yang bertanggung jawab menghilangkan sumber air di kampung mereka.

Akhmad Nazir selaku pegiat komunitas Warga Berdaya, mengatakan, untuk merespon keadaan ini, komunitas Warga Berdaya pun membuat sebuah film dokumenter yang berjudul *Belakang Hotel*.

Film ini mendokumentasikan bagaimana dampak keringnya air sumur warga di

Kampung Miliran, Gowongan, dan Penum-ping. Ketiga kampung ini berada tepat di belakang hotel-hotel yang disinyalir memiliki izin bermasalah, namun sudah beroperasi sekitar 1-2 tahun.

"Kasus ini merupakan puncak gunung es dari hal yang cukup kompleks. Mulai dari urusan perizinan dan pengelolaan tata ruang serta sumber daya publik. Walaupun air telah kembali karena musim hujan, tapi upaya mitigatif harus dilakukan agar 'Jogja Asat' tidak akan terulang," ujarnya, Senin (12/1).

Meski membuat film yang mengkritik pembangunan hotel di Yogyakarta, Nasir mengatakan tidak menolak keberadaan hotel. Karena menurutnya keberadaan hotel juga penting untuk membangun sektor pariwisata Yogyakarta.

Dia menekankan, yang ditolak keberadaannya adalah hotel-hotel bermasalah dalam perizinan namun bisa tetap berdiri.

"Kalau dari segi perizinan saja sudah tidak beres, maka ke depannya operasional hotel tersebut juga akan tidak beres.

Masalah-masalah baru pun akan muncul, antara lain menyebabkan sumur warga yang mengering dan juga kemacetan," kata Nasir.

Menurut Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandera, film yang pemutarannya dilakukan keliling dari kampung ke kampung ini memiliki tujuan untuk mendukung kawasan di Yogyakarta yang telah terdampak oleh hotel, kampung yang sedang terancam pembangunan hotel, dan kampung yang belum terancam.

"Gerakan Warga Berdaya telah memulai inisiatif melakukan pendidikan lingkungan ke kampung-kampung yang melibatkan para praktisi, akademisi, hingga seniman, agar warga siap ketika harus berhadapan dengan rencana pembangunan baru di lingkungan mereka. Dukungan atas pengetahuan dan informasi yang benar juga sangat dibutuhkan oleh warga kampung yang mendapatkan masalah atas dampak pembangunan hotel di lingkungan tempat tinggalnya," kata Halik.

Selain itu, film ini juga merupakan

upaya untuk mengingatkan kembali Pemerintah DIY sebagai pihak yang mengeluarkan izin. Pemerintah harus bersedia memberikan perizinan kepada investor secara terbuka, agar para warga bisa melakukan pengawasan. Jika ada pemberian izin yang melanggar peraturan, maka langkah-langkah antisipasi bisa dilakukan.

Punya Hak Menolak

Nasir menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk memboikot hotel-hotel yang bermasalah, baik soal izin maupun soal operasionalnya. Masyarakat bisa mengirimkan testimoni tentang sebuah hotel ke media-media yang dimiliki komunitas Warga Berdaya.

"Nantinya secara berkala, Warga Berdaya akan menerbitkan daftar hotel mana saja yang berapor baik dan mana saja yang berapor buruk," ujar Nasir.

Peristiwa keringnya banyak sumur dangkal warga Yogyakarta ini baru sekali terjadi, yaitu di tahun 2014. Sumur-sumur berusia ratusan tahun di banyak kampung

hampir serentak mengering.

Kemarau dengan suhu yang cukup tinggi disebutkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta sebagai faktor utama keringnya air sumur. Sementara, warga Yogyakarta memiliki pandangan lain tentang penyebab terjadinya "Jogja asat". Maraknya pembangunan hotel, apartemen, dan mal di Yogyakarta dalam 2-3 tahun terakhir dipandang menjadi penyebab utama.

Berdasarkan data yang dikumpulkan komunitas Warga Berdaya, pada 2010 ada 26 hotel bintang di Kota Yogyakarta yang berdiri dan beroperasi dengan 2.411 kamar. Jumlah ini naik pada tahun-tahun berikutnya, menjadi 31 hotel bintang dengan 2.979 kamar di tahun 2011, 37 hotel bintang dengan 3.356 kamar di tahun 2012, dan 43 hotel bintang dengan 4.002 kamar di tahun 2013.

"Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung untuk fungsi hotel kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melonjak drastis pada bulan November-Desember

2013 yang mencapai 104 aplikasi. Hingga per 31 Desember 2014, dari 104 aplikasi permohonan IMB itu, 77 di antaranya sudah diterbitkan dan proses membangun telah dimulai," papar Nasir.

Konsekuensi dari pertumbuhan gedung tersebut adalah kebutuhan air baku untuk usaha perhotelan. Kebutuhan air baku ini dipenuhi dengan membuat dan mengoperasikan sumur air tanah dalam.

Sayangnya, tuntutan warga hanya dijawab pengelola hotel dengan sekedar memberikan kompensasi atau pemberian bantuan. Pemerintah seakan lupa bahwa izin hotel harus ada perhitungan atas jumlah air yang dibutuhkan.

"Pemerintah seharusnya mengenali wilayahnya dan apa yang terjadi di masyarakatnya, baik pembangunan atau perubahan sosial budayanya. Sehingga masyarakat lokal tidak akan termarginalkan. Media film ini diharapkan menjadi salah satu pembelajaran agar masyarakat paham pembangunan yang berkelanjutan," tutup Halik. (pristiq ayun wirastami)